

	<b>News Title</b> : 2022, Bappebti Awasi Rp22 Ribu Triliun Transaksi Perdagangan Komoditi	
	<b>Media Name</b> : Validnews.id	<b>Journalist</b> : Khairul Kahfi
	<b>Publish Date</b> : 19 January 2023	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> : 1	<b>News Value</b> : 0
	<b>Resources</b> : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	<b>Ads Value</b> : 0
	<b>Section/Rubrication</b> : Ekonomi	<b>Topic</b> : Raker Bappebti

Beranda > Ekonomi > Berita

> EKONOMI

19 Januari 2023 | 17:01 WIB

## 2022, Bappebti Awasi Rp22 Ribu Triliun Transaksi Perdagangan Komoditi

Transaksi yang diawasi Bappebti meliputi transaksi berjangka komoditas, aset kripto, perdagangan emas digital, timah murni batangan, Sistem Resi Gudang, pasar lelang dan sebagainya

Penulis: Khairul Kahfi,  
Editor: Faisal Bachman



Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Kerja Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) di Jakarta, Kamis (19/1/2023). *Antara News/Citra Dedi*

**JAKARTA** – Sepanjang 2022, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap transaksi senilai lebih dari Rp22 ribu triliun. Transaksi tersebut terdiri dari transaksi perdagangan berjangka komoditas sebesar Rp22.181,72 triliun dan perdagangan aset kripto sebesar Rp296,66 triliun.

Plt Kepala Bappebti Kemendag Didid Noordiatmoko mengatakan selain itu, Bappebti juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan fisik emas digital senilai Rp1,98 triliun dan timah murni batangan senilai US\$2,36 miliar.

Selanjutnya, Bappebti juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SRG dan pasar lelang komoditas. Sepanjang 2022, nilai transaksi SRG tercatat sebesar Rp1,275 triliun dengan sekitar 20 jenis komoditas dan 165 gudang yang tersebar di 144 kabupaten di 29 provinsi. Terkait pasar lelang, nilai transaksi yang tercatat adalah sebesar Rp52,5 miliar.

"Besarnya nilai transaksi perdagangan tersebut, berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara maupun pada penerimaan pajak," ujar Didid dalam Rapat Kerja Bappebti di Jakarta, Kamis (19/1).

Bappebti, lanjut Didid, juga turut aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Ini merupakan suatu keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan upaya-upaya pemecahan pencucian uang.

Untuk diketahui, Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditas (*price reference*) sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada 2023. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki harga acuan komoditas tertentu padahal merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditas.

Perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang dibentuk tidak ditentukan semata antara pemilik komoditas dan pembeli di luar negeri.

Didid menambahkan, tugas Bappebti berikutnya adalah mendorong pertumbuhan sistem resi gudang (SRG). Sekadar informasi, SRG merupakan salah satu alat dalam dunia perdagangan yang menyediakan skema pembiayaan murah dengan agunan komoditas.

Namun demikian, skema pembiayaan ini hanya akan berjalan baik jika didukung dengan pemasok (*offtaker*) yang jelas, serta adanya kemudahan dalam mekanisme dan prosedur transaksi. Pemilik barang akan memanfaatkan mekanisme SRG ini, jika diyakini barangnya nanti sudah akan ada yang membeli atau menampung.

### Harga Referensi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Bappebti atas pembentukan harga referensi komoditas unggulan dan peningkatan kinerja SRG.

"Keduanya diharapkan akan menjadi bagian dari upaya untuk menstabilkan harga komoditas serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya petani serta usaha mikro, kecil dan menengah," ujar Zulkifli dalam pembukaan Rapat Kerja Bappebti di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan ini, Zulkifli berpesan agar Bappebti dapat terus meneruskan strategi kebijakan yang proaktif, responsif dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian.

Bappebti diharapkan dapat memperkuat peran, khususnya dalam menyongsong tantangan perdagangan 2023.

"Kemendag akan semakin proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan yang tepat sasaran," kata Zulkifli.

"Kuncinya adalah kolaborasi serta sinergi antarkementerian lembaga dan unit yang ada di Kementerian Perdagangan," lanjutnya.